**PERKAWINAN USIA MUDA di INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA DAN
AGAMA SERTA PERMASALAHANNYA**

***(THE TEEN MARRIAGE IN INDONESIA ON THE COUNTRY
PERSPECTIVE AND RELIGION AS WELL AS THE PROBLEM)***

Surmiati Ali

Fungsional Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sasana Widya Sarwono, Jl. Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta 12710, Indonesia

e-mail: sur_cun@yahoo.com

(Naskah diterima 20/04/2015, direvisi 00/00/2015, disetujui 00/00/2015)

Abstrak

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No.1 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 18 tahun. Oleh karena itu Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalam perspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dan negara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.

Kata Kunci : perkawinan usia muda, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam

Abstract

The problem of the social phenomenon of teen marriage in Indonesia is one of the phenomena that often occurs in some areas of the homeland, either in the urban area or in the rural area. This case shows the simplicity of thought pattern so that the social phenomenon (teen marriage) still recurs and takes place in some areas of the homeland either in the big cities or in the remote homeland. The phenomenon of teen marriage marriage will have an affect on the family life and the quality of human resource of Indonesia. The age of teen marriage is relevant to the height of divorce rate because the husband/wife spouses who are the teenagers have not been ready to build household life. Physiologically, they have not been mature to think, even they tend to be unstable and emotional when there are problems and disputes in their household which end up with a divorce instead. Besides a lot of divorce cases occur, the babby and mother mortality constitutes the highest case in Indonesia. Thus the social phenenom of teen marriage is once again discussed by some experts and public figures.

They try to review Law Number 1 1974 article 7 section 1 which asserts women are allowed to get married at the age of 16 years old and men are 18 years old. Therefore this writing explains how the age of teen marriage on the positive law of the country and Islamic law. There are differences between Islamic law and the country's law in discerning the teen marriage that still occurs in the homeland.

Keyword: teen marriage, Law of Marriage, Islamic Law

A. Pendahuluan

Biro Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa praktek pernikahan dini masih umum terjadi di Indonesia. Data ini ditunjukkan melalui data statistik angka kelahiran menurut usia wanita berdasarkan periode waktu, yaitu pada tahun 2009 dengan periode waktu dari tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan untuk daerah perkotaan di Indonesia terdapat 29% wanita muda usia yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun. Di daerah pedesaan justru menunjukkan lebih tinggi yaitu 58% dan wanita yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun.

Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama dari 33 propinsi di Indonesia dengan jumlah perkawinan usia muda paling tinggi, yakni 19 persen dari jumlah penduduk. Menurut kepala Dinas Kalimantan Selatan data tersebut dapat diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN. Demikian pula hasil survei demografi Kesehatan Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan angka yang mencengangkan, bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan peringkat pertama usia perkawinan Dini antara 10 tahun sampai 14 tahun sebesar 9 persen dan usia antara 15 sampai 19 sebesar 48,8%.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa praktek pernikahan dini masih umum terjadi di Indonesia. Data ini ditunjukkan melalui data statistic angka kelahiran menurut menurut usi wanita berdasarkan periode waktu, yaitu pada tahun

¹ Fikih, Pernikahan Dini di Indonesia, Jakarta, 2010

2009 dengan periode waktu tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan untuk daerah perkotaan Indonesia terdapat 29% wanita muda usia 15 sampai 19 tahun. Di daerah pedesaan justru menunjukkan lebih tinggi yaitu 58% wanita yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun.

Dari hasil penelitian Sosiologi Indonesia (ISI) Jawa Barat juga menduduki peringkat pertama dalam pernikahan usia dini. Dari 1000 penduduk usia 15 tahun sampai 19 tahun terdapat 126 telah melahirkan dan menikah muda, bahkan juga DKI Jakarta juga menduduki peringkat kedua dengan angka 44 dari 1000 penduduk menikah muda dan telah melahirkan di usia 15 sampai 10 tahun. (Ikatan Sosiologi Indonesia, 2012).

Ternyata belum ada perubahan bahwa Provinsi Jawa Barat di tahun 1985 merupakan daerah dimana rata-rata umur perkawinan pertamanya paling rendah di Indonesia, ditemukan di Subang, Karawang, Bandung, Tasikmalaya. Menurut Saifullah dan kawan-kawan dalam penelitiannya 'Pengaruh dan Peranan Wanita' dalam fertilitas pada tahun 1986, hasil yang menunjukkan bahwa prosentase terbesar adalah wanita yang kawin pada umur kurang dari 15 tahun. Vitalaya juga melakukan penelitian berjudul *Women in West Java, Food Health and Development: Case study of Cipari Village in West Java* pada tahun 1979-1981. Dari penelitian tersebut, banyak ditemukan yang menikah pada umur dibawah 15 tahun sebanyak 61% dan tidak ada wanita yang menikah pada umur 20 tahun keatas. Demikian pula penelitian LIPI pada tahun 1988, yang melihat pola perkawinan pada tiga generasi Cilayamaya dan Karawang ditemukan keadaan umur perkawinan pertama 12 dan 13 tahun. Pada perkembangan berikutnya sampai hari ini belum ada perubahan, usia perkawinan

muda umumnya di Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan di beberapa wilayah Indonesia masih tetap dibawah umur 13 sampai 15 tahun, hal ini sangat memprihatinkan.

Pada perkembangan terakhir ternyata belum ada perubahan dalam fenomena pernikahan usia dini. Data tentang anak di Indonesia menunjukkan bahwa berdasarkan laporan pencapaian *Millenium Develoment Goal's* (MDG's) Indonesia pada tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Pembangunan Nasional) menyebutkan, bahwa penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education network for justice* pada enam desa/kelurahan kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara). Kota Bogor Jawa Barat, dan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur menemukan 28,10% informan menikah dibawah usia 18 tahun, mayoritas mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%. Dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31%). Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Menurutnya bahkan di beberapa daerah prosentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%) , Jawa Barat (36%) dan Jawa Tengah (27,84%). Pernikahan lebih muda ditemukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di kawasan Pantura, perkawinan usia dini mencapai 35% dan 20% pernikahan yang dilakukan pada usia 9 sampai 11 tahun, (Fikih-20012). Kondisi ini adalah perampasan hak anak-anak yang semestinya mereka menikmati masa kanak-kanaknya bermain dengan teman sebaya beralih menjadi seorang ibu dalam keluarga, yang sebenarnya mereka belum mampu.

Sebelum temuan diatas, laporan *Into A New World: Young Women' s Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh *The William Ha Gates Foundation* tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13 sampai 18 tahun mencapai 18% dan pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49% pada tahun 1998. Kondisinya saat ini tidak jauh berbeda, berdasarkan hasil penelitian PKPA tahun 2008, misalnya di Kabupaten Nias, angka pernikahan antara usia 13 sampai 18 tahun berjumlah 9,4% dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. Angka pernikahan pada usia muda bagi anak perempuan tiga kali lebih besar dibanding dengan anak-anak laki-laki. (Data Populasi Nias dan Nias Selatan, BPS Tahun 2007).

Sementara di kota malang, menurut catatan Pengadilan Agama kota Malang, bahwa angka pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 50% dibanding pada tahun 2007 sampai bulan September 2008 tercatat 10 pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih dibawah 15 tahun. Dilain pihak, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dari dua juta perkawinan sebanyak 34,5% kategori pernikahan dini. Justru masih tetap mengatakan bahwa data usia pernikahan dini memang tertinggi di Jawa Timur. Menurut hasil penelitian mereka lebih tinggi dari angka-angka nasional yakni mencapai 39%.

Plan Indonesia juga melakukan penelitian, organisasi kemanusiaan yang fokus dan pemberdayaan anak ini, menyampaikan hasil temuannya mengenai pernikahan usia dini. Plan mencatat 33,5% anak usia 13 sampai 18 tahun pernah menikah, dan rata-rata mereka menikah pada usia 15 sampai 16 tahun. Penelitian ini dilakukan di delapan Kabupaten di seluruh Indonesia selama bulan januri sampai April tahun 2011.

Wilayah penelitian mencakup Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah), Tabanan Bali, Dompu (NTB) serta Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT).

Walaupun tidak mewakili seluruh penduduk Indonesia, namun temuan diatas dapat menjadi gambaran kasus pernikahan muda secara umum di tanah air, apalagi data ini tidak jauh berbeda dengan temuan Bappenas tahun 2008 bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah dapat dikatakan perkawinan anak dibawah umur.

Fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidaklah jauh berbeda, penyebab utamanya adalah bahwa perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah sering berakhir dengan pernikahan dini. Selain itu tuntutan sosial budaya yang masih berlaku pada masyarakat, bahwa wanita yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Apabila sudah melewati usia itu, orang tua sangat khawatir, bahwa anaknya akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua.

Melihat fenomena banyaknya usia menikah yang sangat muda, tentunya akan banyak mengalami masalah dalam kehidupan sosial. Pada usia tersebut mereka terpaksa melahirkan, memicu pasangan muda memiliki banyak anak karena tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi. Jika kesuburan sampai 40 tahun, berarti jika dua tahun sekali melahirkan maka jumlah anak mencapai 15 orang, jika tiga tahun sekali, maka jumlah anak mencapai 10 orang. Sementara secara fisik dan mental mereka belum siap untuk melahirkan, bagaimanapun juga mereka harus berhadapan dengan

berbagai macam resiko kehidupan seperti kematian ibu, kematian bayi dan juga berakhirnya rumah tangga dengan perceraian. Pada tahun 2012 angka kematian ibu mencapai 123 kasus, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2013 angka kematian ibu mencapai 60 kasus.

Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkawinan usia dini, namun belum ada perubahan yang berarti, kenyataannya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, masih banyak terjadi bahkan di Negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Fenomena perkawinan usia muda di Indonesia baik yang terjadi di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan ternyata meliputi dari berbagai ragam strata sosial ekonomi dan berlatar belakang budaya, seperti banyak ditemukan di Jawa Barat, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera seperti Bangka Belitung, Aceh dan sebagaimana dijelaskan.

Dari hasil survei data kependudukan Indonesia (SDKI 2007) ternyata di beberapa daerah ditemukan sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia dibawah 16 tahun. Dari laporan tersebut dijelaskan, jumlah perkawinan usia dini Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan 19 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6% dan 36%. Bahkan di sejumlah pedesaan pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat menstruasi.

Jadi perkawinan usia dini hamper terjadi di seluruh Provinsi Indonesia, meskipun ada perbedaan umur namun itu tidak begitu penting, karena selisihnya sangat tipis. Situasi ini terjadi, kuatnya adat istiadat serta pemenuhan tuntutan sosial

budaya dan ekonomi untuk menikah sebelum melampaui usia perkawinan yang dianggap cukup. Menyebabkan anak perempuan sangat singkat menempuh pendidikan, di pihak lain karena kurangnya kesadaran orang tua arti pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya. Keterbatasan pendidikan akan menyulitkan mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarga baik ekonomi, kesehatan sebagai ibu maupun kesehatan balita dan bahkan berujung dengan kematian.

Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 dengan jelas menentang pernikahan anak, namun kenyataannya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia terutama di Indonesia, ini menggambarkan bahwa perlindungan hak asasi kelompok usia muda belum diperhatikan secara serius.

Implementasi Undang-undang sering kali tidak efektif dan terkalahkan oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat. Orang tua akan lebih bahagia ketika anaknya lebih cepat menikah. Sedangkan faktor utama yang mendorong perkawinan muda menurut adat kebiasaan adalah rasa khawatir orang tua jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku. Selain itu, keinginan orang tua untuk melepaskan beban ekonomi orang tua terhadap anak perempuannya.

Jika anaknya sudah beranjak dewasa dan begitu si anak sudah mempunyai teman akrab, tanpa mempertimbangkan kesiapan materi dan mental, orang tua segera menikahkan anak perempuannya. Orang tua gadis mendesak pihak laki-laki untuk meresmikan hubungan anaknya ke jenjang pernikahan. Sebaliknya, apabila sudah ada laki-laki yang melamar anak perempuannya, meskipun duduk di bangku sekolah, anak

akan memilih lebih baik menikah daripada sekolah. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak putus sekolah karena segera dinikahkan. Maka kini, desakan orang tua dipihak perempuan untuk segera menikahkan anaknya dapat dimengerti, karena kekhawatirannya agar tidak sampai terjadi hubungan yang berlarut-larut yang menyebabkan hamil diluar nikah (*Married by Accident*). Hubungan seperti ini selain terlarang dalam ajaran agama juga merupakan aib besar di tengah keluarga dan tercela di masyarakat setempat. Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya dapat dipahami karena teknologi komunikasi yang mudah untuk menonton film porno, internet dan sebagainya. Pengaruh teknologi seperti internet, menonton film porno sangat membayakan jiwa anak dalam hal ini peran orang tua dan guru sangat diperlukan dalam mengamati sikap perilaku anak baik di rumah maupun diluar rumah.

B. Pembahasan

B.1. Permasalahan yang Muncul Akibat Pernikahan Dini

Tingginya angka pernikahan usia dini sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah, masa muda atau masa anak-anak yang sangat indah itu seharusnya diisi dengan hal-hal yang positif terutama pendidikan. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik, hal tersebut merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Fenomena perkawinan anak yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia nampaknya menuntut semua pihak untuk memperhatikan masa depan anak sebagai generasi yang

akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Haruskah direnggut kemerdekaan anak hanya karena faktor sosial budaya dan ekonomi dalam keluarga.

Menurut Hasil penelitian ibu dan anak, dampak pernikahan usia dini sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan terutama kualitas ibu dan kualitas bayi sebagai berikut dibawah ini:

1. Kualitas Ibu

- Kehamilan dini membuat ibu kurang terpenuhi gizi bagi diri sendiri
- Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
- Beresiko meninggal pada usia dini
- Meningkatnya angka kematian ibu
- Menurut Study epidemiologi ibu muda terkena kanker serviks. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- Resiko terkena pengakit seksual.

2. Kualitas Anak

- Berat bayi lahir cenderung lebih rendah, karena kebutuhan nutrisi ibu hamil harus lebih banyak dan keduanya sangat membutuhkan nutrisi.
- Bayi yang dilahirkan kekurangan gizi, oleh karena itu rentan kena penyakit yang mengakibatkan meninggal.

3. Kualitas Rumah Tangga

- Banyak pernikahan usia dini berbanding lurus dengan angka perceraian, sehingga banyak kasus perceraian yang merupakan dampak dari pernikahan usia dini.
- Tidak cocok hubungan orang tua maupun mertua.

- Kurang mampu untuk adaptasi dan sosialisasi.
- Keterbatasan ekonomi karena tidak mempunyai pekerjaan yang layak, dan mencetak generasi miskin.

4. Kekerasan Rumah Tangga, Meninggal dan Putus Sekolah.

Menurut hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan pada perlindungan Anak, sebanyak 44% anak perempuan yang menikah di usia dini mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan tingkat frekwensi tinggi, sisinya 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekwensi rendah. Selain tinggi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan perempuan berusia 20 sampai 25 tahun. Jika anak itu berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Relakah kita jika anak-anak masih dibawah umur mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan karena belum siap mengharungi badai rumah tangga. Kepala BKKBN juga menyatakan bahwa secara medis pernikahan dibawah umur memang sangat beresiko, karena terlalu muda adalah kejadian pendarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan.²

5. Terputusnya Tingkat Pendidikan

Pernikahan dini sudah tentu mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian Organisasi Kemanusiaan tersebut, hanya 5,6% anak yang menikah di usia dini yang

² Alimoeso Sudibyo, 2012

melanjutkan sekolah setelah menikah ³ dan selebihnya mereka putus sekolah karena mengemban kehidupan rumah tangga. Namun rumah tangga mereka sangat jarang yang mencapai keluarga sejahtera.

6. Lonjatan penduduk

Pernikahan dini adalah salah satu penyumbang loncatan penduduk, hal ini dapat diketahui bahwa saat ini jumlah penduduk Jawa Barat telah mencapai 43 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan hampir mencapai 2% per tahun. Jika diantisipasi pertumbuhan penduduk lebih awal akan semakin sulit mengendalikan pertumbuhan penduduk nantinya. Apalagi tingkat kelahiran Jawa Barat saat ini hampir usia produktif. Padahal idealnya hanya memiliki dua anak agar pertumbuhan penduduk mencapai angka minimum.

Kepala BKKBN mengatakan untuk mengantisipasinya diperlukan penyuluhan dalam berbagai bidang kepada anak-anak remaja. Menurut mereka banyaknya pernikahan usia dini berbading lurus dengan tingkat perceraian di enam daerah yang menjadi wilayah penelitian Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) yaitu Indramayu, Purwakarta, Garut, Cianjur, Majalengka dan Sukabumi. Data garut 670 perkara, Cianjur 676 perkara, Majalengka 2213 perkara dan Sukabumi 169 perkara. Secara Keseluruhan dari dua puluh delapan daerah di Jawa Barat terjadi 29.583 perkara cerai, yang meliputi 13.917 cerai talak dan 15.666 cerai gugat.

Idealnya usia perkawinan yang mengacu kepada kesehatan reproduksi, tentunya harus diatas 18 sampai 20 tahun. Kenyataannya perkawinan usia dini mengandung banyak masalah yang jelas baik secara fisik maupun secara ekonomi

³ Organisasi Perlindungan Anak, 2013

mereka belum siap dalam membina rumah tangganya dan rumah tangga seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena kematangan mental sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga belum ada. Oleh karena itu perkawinan di usia muda dan sangat rapuh, sering terjadi percekocokan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak berujung dengan perceraian.

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang muncul akibat dari usia pernikahan dini, maka dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana hukum Negara dan hukum Islam dalam menyikapi usia perkawinan dini yang tengah terjadi di tanah air. Namun terjadi silang pendapat baik dikalangan ulama Islam sendiri, menyikapi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dilain pihak MUI, dan pengurus besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menolak mengubah aturan batas usia nikah perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa (balig) menurut ajaran Islam banyak menimbulkan akses negatif meningkatnya aborsi dikalangan remaja wanita” (Ketua MUI, Hamidan: 2014), dia memberi keterangan sebagai pihak terkait pengujian UU perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan angka batas minimal 16 tahun untuk usia wanita, maka akses-akses negatif yang terjadi di masyarakat seperti itu bisa diantisipasi. Oleh karena itu, pengaturan batas minimal 16 tahun usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak perlu dipermasalahkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945”.⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rais Syriah pengurus Besar NU (PBNU) K.H. Ahmad Ishomudin bahwa frasa 16 tahun bagi wanita Pasal 7

⁴ Amidan Amin

ayat (1) UU Tahun 1974 tidak perlu diubah karena sudah disetujui oleh pembuat UU di DPR dan para Ulama di Indonesia.

Menurut Ishomiddin Ahmad pertimbangan usia nikah minimal 16 tahun bagi wanita, pertimbangan antara lain kebebasan remaja yang luar biasa. Sementara meningkatkan batasan pernikahan menjadi 18 tahun itu mirip dengan menunda nunda pernikahan. Sementara pernikahan merupakan solusi atau jalan keluar dari pergaulan bebas perizinan.

Yang jelas Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak gugatan para permohonan uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menginginkan batas usia nikah menjadi 18 tahun dan sebelumnya 16 tahun, Ketua “MUI berpandangan, bahwa dalil para pemohon tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi mahkamah untuk mrngubah frasa 16 tahun menjadi 18 tahun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan”.

B.2. Perkawinan Usia Dini dalam Pandangan Hukum Negara

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang pekawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.

Hukum perkawinan di bawah umur Menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika merujuk Kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, menurut Pasal ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974: Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Pasal 7 UU ayat 1 Tahun 1974: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pada prinsipnya Negara membuat batasan umur minimal untuk kawin bagi warga Negara Indonesia adalah dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai, yang penting dapat tercapai aspek kebahagiaan. Jadi “perkawinan dibawah umur”, sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, pada hakekatnya usia 16 tahun masih termasuk katagori anak-anak belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) pada usia ini masih dikatagorikan anak-anak yang belum mampu membangun rumah tangga yang tangguh.

Negara menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak-hak anak yang menyatakan, bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”. Pasal 7 ayat 1 No.23 Tahun 2002 menyatakan, bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat, demi pengembangan diri”. Kemudian Pasal 13 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002: setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Bahkan orang tua juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya. c) Mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Definisi usia anak menurut Konvensi Internasional Tahun 1989 adalah “Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun”. Hukum Negara Indonesia juga telah menentukan bahwa masa anak dimulai sejak anak dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Aturan ini ditulis dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pandangan yang salah terhadap anak berdampak pada perlakuan terhadap anak-anak yang pada gilirannya akan berdampak pula pada situasi masyarakat secara luas.⁵ Menurutnya dalam pandangan Yayasan Pemantauan Hak Anak (YPHA), “standar Internasional tentang batas usia kedewasaan telah diadopsi oleh hukum

⁵ Arna Antarini, 2010

positif Indonesia. Konsekuensinya, semua peraturan yang menyangkut tentang anak dan perlindungan anak harus diharmonisasi dengan UU Perlindungan anak, termasuk dalam penentuan batas usia kedewasaan perkawinan”.

Tinjauan Norma Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi karena menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya adanya perkawinan anak dalam hal ini anak perempuan yang belum mencapai 18 tahun. Pada hal usia kedewasaan jika seseorang sudah usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan, pemerintah menganggap Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan sebagai kesepakatan Nasional yang merupakan kebijakan (*Open Legal Policy*) pembentuk Undang-undang. Sementara hukum Islam tidak menyebutkan batas usia perkawinan, namun secara umum disebutkan akil baligh yang meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap , jiwa kedua mempelai, bertanggung jawab, memenuhi kesehatan untuk melahirkan, untuk mendapat keturunan baik dan sehat.

Jika melihat UU Negara Pasal 45 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. “Apabila seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Hal ini berarti usia 16 tahun masih dianggap usia anak dan belum pantas dikenakan hukum pidana, dan juga berarti belum umur 16 tahun belum pantas untuk menikah”.

Kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat sebagaimana telah disebutkan di atas hampir diseluruh tanah air, batas usia perkawinan lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah yang mengakibatkan laju perkembangan penduduk semakin cepat, terutama di Jawa Barat. Atas dasar itu Undang-undang perkawinan bagi laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pembatasan ini hakekatnya mencegah perkawinan dibawah umur (dini) dan menunjang keberhasilan program Keluarga Berencana secara Nasional. Menurut Mualimin Abdi Plt Dirjen peraturan perundangan. Banyak masyarakat yang menginginkan pendewasaan usia perkawinan.⁶

Abdi mengatakan ada perbedaan batas usia antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang lainnya seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan yang menentukan batas usia anak 18 memang dimungkinkan. Sebab berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan terkait perbedaan batas usia ini disesuaikan materi muatan yang akan diatur. Oleh karena itu menurutnya pemerintah beranggapan pemohon bahwa frasa “16 tahun” dalam Pasal ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidak pastian, ketidakserasian, dan ketidak seimbangan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan adalah keliru. Justru menurut Mualimin, diberikan pengaturan batas umur perkawinan memberi kepastian hukum dan mencegah perkawinan dibawah umur.

⁶ Abdi Mualimin, 2012

B.3. Pandangan Islam terhadap Pernikahan Dini

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literature fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan, baik usia minimal maupun maksimal. Meskipun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga bahagia sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan. Hal ini dapat tercapai pada usia dimana calon penganten telah sempurna pemikirannya, baik secara mental maupun secara ekonomis.

Oleh sebab itu, Shekh Ibrahim dalam bukunya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga. Hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan (Supriana Andika: 2010). Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang tenggelam oleh lembaran sejarah, tetapi kenyataan isu ini muncul kembali ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini terlihat betapa dahsyatnya benturan ide yang muncul antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Para ahli mengatakan bahwa hukum Islam secara umum mengandung lima prinsip; yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (Hifzu Al-Nash). Oleh karena itu menurut Syeh Ibrahim agar garis keturunan nasab tetap terpelihara dengan baik, hubungan seks yang dibolehkan, harus mendapatkan legalitas agama. Bahkan juga harus memperhatikan berbagai aspek sebelum nikah, terutama kedewasaan sangat penting dalam mengharungi kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Seorang pemuka Islam Ibnu Syubromah menjelaskan bahwa usia pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia baligh sebenarnya terlarang, kenapa?. Menurut dia nilai esensial dari pernikahan tersebut adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan yang lebih baik. Sementara dua hal tersebut belum terdapat pada anak yang belum baligh, ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan (Supriatna Andika). Syubromah mencoba mengabaikan teks hadits masa lalu, dia memahami masalah ini dari sudut pandang historis, sosiologis dan kultural pada masa Nabi, namun pendapat syubromah pada masa lalu kurang populer ditengah sebagian ulama Islam. Lain hal sekarang Ulama besar ahli tafsir Al-Quraan Quraish Sihhab dan Ketua NU Said Agil Shiraj juga menggaris bawahi pendapat Ibnu Syubromah terdahulu, menurut kedua pakar ini umur 16 tahun masih terlalu muda untuk menikah, oleh karena itu perlu peningkatan umur perkawinan.

Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini, pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari surat Al Thalaq ayat 4, selain itu , sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Oleh nabi Muhammad Saw (saat itu berusia 6 tahun). Ibnu Syubromah mengatakan ketentuan itu hanya berlaku untuk nabi dan bukan untuk di contoh oleh umatnya. Meskipun para pakar sekarang ini mengakui bahwa perkawinan usia dini sebenarnya mempunyai dampak yang tidak baik dalam kehidupan selanjutnya.

Jika sebagian ulama mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai batasan dalam usia perkawinan, hal ini tergantung kepada kemashalatan pribadi orang tersebut. Imam Sayuthi pernah menulis dua hadits adalah “ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda-tunda yaitu shalat ketika datang waktunya, jika ada jenazah di

tengah rumah, dan bila anak perempuan ketika diajak menikah”. Sebenarnya Islam memandang kemashalatan atau kebaikan, jika seseorang akan terjerumus ke dalam lembah dosa atau perzinahan maka perkawinan dini harus dilakukan. Misalnya karena pergaulan bebas anak-anak remaja sekarang ini karena pengaruh film dan internet, terjadi kehamilan, mereka terpaksa nikah dini. Tetapi bila tidak ada masalah sebaik pernikahan mencapai usia dewasa karena sepasang suami istri akan menanggung beban rumah tangga baik moril dan materil untuk itu diharuskan calon pengantin mencapai usia kematangan untuk menikah, minimal 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

Pandangan Ulama Jawa Timur sepanjang Januari sampai Maret tahun 2011, Pengadilan Agama menerima 108 permohonan dari orang tua yang meminta dispensasi agar anak mereka yang masih berusia belia boleh menikah. Jadi sekitar 70 persen dari seluruh pemohon bahwa anak mereka sudah hamil di luar nikah. Selebihnya dispensasi dimohonkan karena para orang tua khawatir putra putri mereka berzina atau hubungan seksual diluar nikah.

Pengadilan agama harus menganalisis sebab akibat secara komprehensif sebelum dispensasi diberikan kepada PUS Pasangan Usia Subur, karena menurut para pakar, sekarang ini banyak perkawinan usia dini mengalami kekerasan rumah tangga dan berujung dengan perceraian. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang misalnya, menolak pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama setempat terhadap pasangan usia subur (PUS) kurang dari 20 tahun untuk menikah. Menurut MUI Kabupaten Malang ini bahwa Pasangan Usia Subur untuk menikah idealnya 20 sampai 30 tahun. Sebagaimana diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten

Malang menolak pemberian Dispensasi oleh Pengadilan Agama Setempat kepada Pasangan Usia Subur yaitu kurang dari 20 tahun untuk menikah.

Akhir-akhir ini Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak pemerintah merivisi UU NO.1/1974 tentang Perkawinan. Menurut mereka UU tersebut dinilai berkontribusi pada fenomena pernikahan usia dan kematian ibu melahirkan. Gagasan revisi ini tengah dibahas secara internal dikalangan PBNU. Hasil pembahasan, nantinya bakal dijadikan masukan bagi pemerintah untuk melakukan proses revisi UU tersebut. Ketua PBNU megeluhkan batasan usia pernikahan bagi perempuan di dalam hukum Negara kita yang masih simpang siur. Undang-undang perkawinan batasan minimal 16 tahun, sementara Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan 18 tahun dan BKKBN menyarankan Usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun.

Said Agil (PBNU) mengusulkan idealnya usia perkawinan pertama bagi perempuan adalah 18 tahun, ini jalan paling tengah. Sebenarnya pada tahun 2012 revisi Undang-undang perkawinan sudah diajukan usulannya ke DPR dan masuk ke dalam prolegnas. Namun, revisi UU itu tidak menjadi prioritas di tahun tersebut.

Menurut Quraish Shihab berdasarkan perspektif agama menurut dalam sunnah nabi dan juga dalam kitab Suci Alquraan, tidak ada yang menetapkan batas usia calon mempelai wanita, yang tercantum dalam Alquran dan sunah adalah tujuan pernikahan. Menurut shihab soal aqil balig menurutnya dilihat dari kesiapan fisiknya namun juga kesiapan mental seseorang. Jadi

Sebenarnya usia 16 tahun dan 19 tahun masih terlalu muda. Dalam hal ini senada dengan Hamidan ia menegaskan, jika dalam hukum Islam tak ada masalah adanya rencana batasan usia menikah 18 tahun, idealnya memang sudah harus ditingkatkan dalam batas usia 16 tahun. MUI sendiri belum membahas hal ini “jelasnya terlalu muda juga sering berujung dengan perceraian, senada dengan shihab, pastur juga menyatakan yang sama dari sudut pandang khatolik usia 16 tahun masih terlalu muda bagi perempuan untuk mengemban tanggung jawab membina rumah tangga” kata Prabowo. Jadi mereka mendukung peninjauan kembali Pasal 7 ayat 1 dan 2.

Pakar Islam Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum baligh). Menurutnya adalah nilai yang tertinggi dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan kepada tujuan pokok pernikahan. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak biasa ditiru. Pendapat ini digaris bawahi oleh Quraisy Shihab sebagai seorang ahli tafsir dia menyatakan perkawinan nabi tiadak akan sama dengan kita manusia biasa, oleh karena itu tidak sepatutnya manusia biasa menyamakan diri dengan Nabi terutama dalam usia perkawinan. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini hasil dari Interpretasi ayat alquraan surat Attalaq ayat 4. Selain itu sejarah juga

mencatat bahwa Aisyah dinikahi Rasulullah dalam usia sangat muda, tetap untuk ditiru oleh umatnya.

Penentuan kedewasaan usia perkawinan tersebut semakin penting artinya tatkala diingat ketika para pakar hukum Islam, bahkan para Ilmuan lain menentukan batas kedewasaan secara variatif, pada saat yang sama, masyarakat terutama masyarakat desa menghendaki untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih dibawah umur. Berapa ulama mendukung hal itu, dengan alasan bahwa jika seseorang sudah mengalami proses baligh maka orang itu sudah dipandang cakap untuk melakuian perbuatan hukum, tanpa perlu memperhitungkan masalah pendidikan, masalah kemampuan mencari nafkah, faktor pengaruh pada keluarga dan lain-lain.

Kenyataannya bahwa perkawinan dibawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat Indonesia, tetapi sebaliknya perkawinan usia dini merupakan isu atau persoalan yang merupakan perhatian masyarakat dan berlanjut menjadi kasus hukum seperti yang terjadi pada kasus Syeh Puji dengan Ulfa yang berusia 12 tahun, apa yang terjadi timbul berbagai pernyataan ditengah-tengah masyarakat, ada yang menentang dan ada pula yang membolehkan.

Zumrotin Dewan pengurus Kesehatan Perempuan juga mempersoalkan batas usia perkawinan bagi wanita, yakni 16 tahun melalui pengujian Pasal 7 ayat (1) UU perkawinan. Alasannya perkawinan anak dengan kehamilan dibawah usia 18 tahun mengandung resiko tinggi. Si ibu masih dalam pertumbuhan, sehingga akan terjadi perebutan gizi antara ibu dengan bayi. Pemohon berpandangan norma Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi karena menjadi landasan dasar hukum dibenarkan adanya perkawinan anak, dalam hal ini anak perempuan yang

mencapai 18 tahun. Pada usia dewasa jika seorang sudah mencapai 18 tahun sesuai Pasal 26 UU tentang Perlindungan Anak dan Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keinginan menaikkan usia menikah anak, sekarang ini datang dari berbagai pihak, misalnya Ketua pengurus Nahdatul Ulama Said Agil Siraj dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mereka berpendapat jika usia perkawinan dinaikkan usia perkawinan, maka anak akan lebih baik tumbuh berkembang sebagai manusia sempurna dan layak untuk membangun rumah tangga.

C. Penutup

Inti dari hukum Islam dan hokum positif Negara adalah menciptakan kemashalatan sosial bagi masyarakat untuk masa kini dan yang akan datang, hukum Islam bersifat humanis , membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karena itu hukum Islam selalu relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.

Persoalannya adalah kebijakan pemerintah maupun hukum agama, meskipun ada nilai positif, maka saling mengandung kelemahan, meskipun ada segi positifnya. Pemerintah dengan undang-undang yang telah ditetapkan masih tetap saja belum memadai dalam kehidupan sekarang, nampaknya usia pernikahan perlu ditingkatkan lagi.

Menyikapi masalah tersebut, jika mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, jika terjadi dua kemashalatan , maka kita dituntut untuk menimbang atau menakar mana maslahat yang lebih baik atau utama untuk dilaksanakan. Kaidah

tersebut jika dikaitkan dengan usia pernikahan dini. Maka nampaknya bersifat individual relatif. Apabila ia menikah di usia muda mampu mengarungi bahtera rumah tangga sampai hari tua bernilai maka itulah yang terbaik. Sebaliknya jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang, mengandung nilai positif dan mampu menahan diri dari gelimangan dosa, maka itulah yang terbaik.

Pernikahan anak dibawah umur masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Persoalan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal menyikapi pernikahan dini. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat menjadi penengah diantara kelompok yang berbeda pendapat dan mampu menegakkan regulasi terkait pernikahan anak dibawah umur. Sinergi tersebut mampu mengurangi agar pernikahan anak dibawah umur tidak marak lagi.

Ditinjau dari sudut anak, maka anak sebagai generasi muda penerus dan pelanjut sejarah, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, karena anak modal dalam pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan system terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).

Oleh karena itu fenomena kematian ibu muda maupun bayi, dan keretakan rumah tangga, atau lebih khusus gagalnya perkawinan penyebabnya adalah

pernikahan yang terlalu dini. Perkawinan yang belum mampu mengemban rumah tangga bahagia. Jika perkawinan hanya merupakan tuntutan agama, secara nyata telah membawa perkawinan ke dalam bentuk pelaksanaan agama yang kurang memperhatikan sisi baik dan buruk, dimana perkawinan diartikan sekedar sebagai “lembaga pengesahan” hasrat biologis manusia. Oleh karena itu, banyak perkawinan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung di bawah mentalitas yang salah atau *error of mentality*.

Oleh karena itu UU. NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, nampaknya perlu diamandemen, usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 18 tahun bagi laki-laki masih terlalu muda untuk berumah tangga, karena dari berbagai hasil penelitian di Indonesia mengenai usia perkawinan muda ternyata sangat berdampak negatif bagi rumah tangga yang melangsungkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu menurut penulis perempuan sebaiknya menikah paling ideal menikah di usia 21- atau 22 tahun , karena yang paling bermasalah adalah anak perempuan jika dibanding laki-laki.

Daftar Pustaka

- Anita, 2008. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Rumah Tangga.
- Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, 1984. Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam.
- Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2010. Angka Penyebab Langsung Kematian Ibu di Jawa Barat.
- Djamil Abdul, 1992. Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju.
- Fatawie Yusuf, 2013. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara.
- Fatikum Muhammad. Hukum pernikahan Dini Dalam pandangan Masyarakat
- Fitri Puspitasari, 2010. Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa mandala Giri Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya). Skripsi Unversitas Negeri.
- Fiat Justitia Ruat Caelum, 2013. Makalah Hukum Islam Perkawinan Usia Dini.
- Justitia, Fiaf, 2014. Fenomena Perkawinan Usia Di I dilihat dari sudut Filasfat Hukum, [helmichandrasy.blogspot.com /2014/ 04fenomena-perkawinan-usi-dini-dilihat.html](http://helmichandrasy.blogspot.com/2014/04/fenomena-perkawinan-usi-dini-dilihat.html)
- Dini Kurnia, 2014. Makalah Hukum Islam: Perkawinan Usia Dini, dhikikurnia.blogspot.com/2013/07.
- Muslim Minang, 2012. Allah Menyukai Pernikahan Dini, Mengapa Orang Tua Masih Ragu untuk Menikahkan Putra-Putri Mereka.
- Rahmah Khairiyati dkk, 2012. Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia.
- Riadi, 2009. Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian. Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sumiharjo, 2009. Perkawinan Dini dan Implikasinya.
- Supriyada dan Harahap Yulkarnain, 2009. Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.
- Tri Purnama Cahya, 2010. Perkawinan Usia Muda, Kaitannya dengan Kematian Balita di Desa Cermo Kecamatan Sumbi Kabupaten Boyolali. Jawa Tengah: hesis Universitas Diponegoro
- Wedi Trisnawati, 2013. Akibat Pernikahan Dini Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, larasatimenikhukum-unknown.